

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Berbicara mengenai pendidikan Indonesia, kita selalu akrab dengan nama-nama seperti Ki Hadjar Dewantara, R.A. Kartini, Dewi Sartika, KH.Hasyim Asy'ari, KH.Ahmad Dahlan, dan sebagainya. Sedangkan dalam dunia pendidikan kontemporer, nama-nama seperti Conny Semiawan dan H.A.R Tilaar menjadi contoh nama yang tak asing kita dengar. Sebenarnya di luar nama-nama tersebut, ada satu nama yang terlupakan yang memiliki kontribusi bagi pendidikan Indonesia yaitu Soedijarto, seorang sosok pemikir yang penting dimana melahirkan kebijakan yang sangat berguna di dunia pendidikan nasional. Sosok yang memiliki komitmen tinggi dalam memajukan pendidikan nasional. Hal itu terlihat dari berbagai karya tulisnya dalam mendorong penyelenggaraan sistem pendidikan nasional sehingga mampu melaksanakan fungsi konstitusionalnya agar pendidikan berperan dalam proses pembudayaan kemampuan, sikap, dan nilai manusia Indonesia baru yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Soedijarto adalah tokoh pendidikan nasional yang gigih memperjuangkan agar anggaran pendidikan ditingkatkan untuk menunjang kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu alasannya, kewajiban negara membiayai pendidikan nasional, termasuk peningkatan kesejahteraan guru, dan penyempurnaan sarana dan prasarana pendidikan. Sebab pendidikan meru-

pakan investasi bagi masa depan kemajuan bangsa.¹ Selama karirnya sebagai pegawai negeri, ia memperoleh dua penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun (1995) dan Bintang Jasa Utama dari Presiden Republik Indonesia tahun 1997. Serta beberapa kali menjadi wakil Indonesia pada bidang pendidikan khususnya di seminar internasional.²

Perjuangan Soedijarto diperlihatkan saat dirinya menjadi anggota Fraksi Utusan Golongan mewakili Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang aktif dalam perumusan GBHN 1999, ia berkesempatan menuangkan kristalisasi pengalamannya sebagai seorang pendidik yang berpengalaman dalam manajemen pendidikan ke dalam konsepsi dasar kebijakan negara dalam sektor pendidikan. Sebagai orang yang memang sangat menguasai ilmu pendidikan, Soedijarto meyakini bahwa kemajuan bangsa sangat di tentukan oleh penyelenggaraan pendidikan nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan nasional merupakan sebagai bagian dari proyek nation building.³

Sebagai bagian proyek penting dari proses nation building pendidikan membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Oleh karena itu ketika Soedijarto menjadi anggota Fraksi Utusan Golongan MPR RI, anggaran pendidikan itu dia perjuangkan agar masuk dalam konstitusi agar negara dan para

¹ Ika UNJ, '' Soedijarto: Pedagogik yang mencerdaskan kehidupan bangsa?'' , di akses pada Kamis, 19 Desember 2019

² Bulletin Pendidikan & Kebudajaan, Seminar Pendidikan Asia di Singapura, 23-24 Mei 1969. Hal 1

³ Soedijarto, *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT.Grasindo 1993)

penyelenggara tidak abai terhadap kewajibannya untuk membiayai pendidikan nasional itu.

Kepedulian Soedijarto terhadap pendidikan telah terinternalisasi dalam dirinya sejak masih menjadi mahasiswa. Terlihat nyata kala dirinya menjadi pengurus cabang gerakan mahasiswa nasional Indonesia (GMNI) Bandung 1960-1962 serta sebagai pimpinan senat mahasiswa FKIP UNPAD dan sebagai pimpinan badan koordinasi senat mahasiswa FKIP se-Indonesia. Soedijarto merupakan salah seorang tokoh yang dengan gayanya yang khas, telah memaparkan visi pendidikan yang “mencerdaskan kehidupan bangsa” di hadapan Bung Karno pada tanggal 30 September 1962⁴. Paparannya tentang pentingnya lembaga pendidikan guru yang harus ber taraf universitas atas usulan Soedjarto dan para pemuda lain nya langsung dijawab oleh Bung Karno dengan menerbitkan SK Presiden No.2 Tahun 1963 mengenai didirikannya “Institut Pendidikan dan Keguruan (IKIP)”, pendirian IKIP ini diumumkan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, yaitu Prof. Dr. Ir. Toyib Hadiwijaya dan sebagai institusi pendidikan tinggi kependidikan yang belakangan telah berubah menjadi universitas-universitas negeri sebagaimana dicita-citakannya dan Soedijarto sendiri ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Ahli Pendirian IKIP di bawah Departemen PTIP pada tahun 1963-1964.

⁴Surat Kabar Antara, *“Perguruan Tinggi Harus Mendjaji Alat Ampuh Untuk Selesaikan Tri-Kerangka Tudjuan Revolusi”*, (Minggu, 30-12-1962)

Menyoroti jenjang pendidikan tinggi, Perguruan tinggi menjadi titik penting dalam melahirkan calon-calon guru berkualitas. Karena pendidikan tinggi bertanggung jawab untuk menghasilkan insan-insan yang sanggup mencari solusi memecahkan masalah-masalah nasional dan internasional, baik masalah kontemporer maupun jangka panjang sesuai kapasitas akademiknya.⁵

Guru memiliki peranan yang amat strategis di dalam pendidikan anak bangsa. Kemampuan profesionalnya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan guru.⁶ Pemerintah pun harus sangat ketat dan selektif menugasi lembaga pendidikan untuk menyiapkan guru profesional dan pembinaannya setelah mereka bertugas di sekolah. Guru profesional hanya dapat dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang profesional. Sebab, pekerjaan guru sebagai jabatan profesional, memerlukan pendidikan lanjut dan latihan khusus. Adapun sertifikasi pendidik pada hakikatnya upaya untuk menjamin bahwa setiap guru dapat dijamin kualifikasi dan kemampuan, baik paedagogik, kepribadian, sosial, maupun profesionalnya.

Berbeda dengan berbagai negara di dunia, Indonesia meletakkan misi “mencerdaskan kehidupan bangsa” dalam deklarasi kemerdekaannya (Pembukaan UUD 1945) dan menetapkan “hak warga negara memperoleh pangajaran (pendidikan)” serta “kewajiban pemerintah mengusahakan dan

⁵Meliono Irmayanti, *Etika pendidikan dan kebijakan pendidikan di Indonesia*, dalam *Pedagogik kritis Perkembangan, Substansi, dan perkembangannya di Indonesia* (Jakarta, PT Rineka Cipta)

⁶ Wahyudi Imam, *Pengembangan Pendidikan Strategi Inovatif & Kreatif dalam mengelola Pendidikan secara Komprehensif*. (Jakarta, PT Prestasi Pustakarya, 2012), hal.24

menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional” dalam UUD-nya (UUD 1945).⁷ Namun semenjak krisis multidimensional tahun 1998⁸, hingga kini negeri ini belum juga mampu untuk bangkit dari keterpurukan. Kenyataan fenomenal ini merupakan indikasi bahwa penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa ini di atas, masih jauh dari berhasil.

Soedijarto menengarai bahwa kekacauan sistem pendidikan kita dikarenakan lemahnya falsafah yang mendasari praksis pendidikan di lapangan dan diabaikannya pendidikan nasional sebagai wahana untuk menunjang transformasi budaya menuju tegaknya negara kebangsaan yang ber peradaban tinggi.⁹ Lebih jauh Soedijarto juga menyoroti lemahnya kurikulum, sistem evaluasi, peran perguruan tinggi hingga permasalahan klasik pendidikan yang terkait dengan minimnya dukungan dana dari pemerintah. Lembaga-lembaga pendidikan terutama lembaga pendidikan persekolahan dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi, termasuk Pendidikan Gurunya, belum dapat berperan secara efektif dalam mengem-

⁷ Reksohadiprodjo Said Mohamad Ki, *Masalah Pendidikan Nasional Beberapa Sumbangan Pikiran*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989)

⁸ Soedijarto, *Pendidikan Nasional Sebagai wahana mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun peradaban negara-bangsa (sebuah usaha memahami makna UUD 45)*, (Jakarta: CINAPS, 2000)

⁹ Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional kita*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008). Hal 13

bangkan manusia yang berkualitas diukur dari tuntutan masyarakat kebangsaan yang merdeka, demokratis, berperadapan dan tangguh secara ekonomi.¹⁰

Sebagai seorang nasionalis, Soedijarto mengupas banyak tentang perlunya pemahaman kembali terhadap landasan filosofis negara yang menjadi falsafah pendidikan kita. Bahkan, secara spesifik Soedijarto banyak mengutip pemikiran Bung Karno dengan tajuknya yang bertema Pancasila ala-Bung Karno yang perlu diperjuangkan melalui pendidikan nasional. Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi landasan dan arah pendidikan nasional telah mengamanatkan kepada penyelenggara negara (Presiden dan DPR) untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan satu sistem pengajaran nasional.¹¹ Faktanya, hal tersebut tidak dilaksanakan. Menurut Soedijarto, tanpa memahami hakikat Pancasila sebagai filsafat dasar negara, tidak mungkin kita dapat merancang dan menyelenggarakan pendidikan nasional. Pendidikan berdasarkan Pancasila adalah pendidikan yang dirancang untuk melahirkan generasi muda yang mampu membangun negara kebangsaan yang demokratis, berkeadilan sosial, berperikemanusiaan dan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Soedijarto sangat menyayangkan doktrin Tri Darma Perguruan Tinggi yang diperkenalkan sejak 1962, yakni pendidikan, penelitian dan

¹⁰ Soedijarto, *Pendidikan Nasional Sebagai wahana mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun peradaban negara-bangsa (sebuah usaha memahami makna UUD 45)*, (Jakarta: CINAPS, 2000), hal 167

¹¹ Soedijarto, *Pendidikan sebagai Sarana Reformasi Mental dalam upaya Pembangunan Bangsa*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1998). Hal.23

pengabdian masyarakat, tidak berjalan semestinya. Perguruan tinggi di Indonesia dinilainya tidak lebih dari sekolah tinggi yang peranannya hanya menghasilkan lulusan dan melakukan bakti sosial. Tanggung jawabnya untuk bisa membantu memecahkan masalah nasional dan internasional, baik kontemporer maupun jangka panjang sesuai kapasitas akademiknya, terabaikan. Agar perguruan tinggi dapat menjadi lembaga pendidikan, lembaga riset dan lembaga penggerak pembangunan, pemerintah harus menjamin dan memberikan otonomi penuh kepada perguruan tinggi, yang mencakup bidang akademik, keuangan dan manajerial. Pelaksanaan otonomi wajib didukung oleh peraturan perundang-undangan, utamanya yang lintas departemen.¹²

Idealnya ada satu format perguruan tinggi yang menjadi agen untuk membangun persatuan bangsa. Perguruan tinggi selayaknya memainkan peran strategis sebagai perekat bangsa.¹³ Perguruan tinggi perlu menyelenggarakan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru secara nasional yang dapat menjangkau anak-anak berbakat seluruh daerah di Indonesia untuk dapat diterima di perguruan tinggi yang berkualitas, sehingga perguruan tinggi tidak berkembang menjadi perguruan tinggi kedaerahan. Tujuannya perguruan tinggi mesti menjadi pusat pembangunan bangsa dengan menghilangkan karakter kedaerahan dalam kehidupan perguruan tinggi.

¹²Soedijarto, *Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI*, (Jakarta: Grasindo, 1991)

¹³ Undang-Undang No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Di sisi lain perguruan tinggi dituntut untuk menetapkan dan meningkatkan *standard of excellent dan meritocracy* dalam proses rekrutmen tenaga pengajar, penerimaan mahasiswa, dan promosinya. Menurut Studi yang dilakukan pada tahun 1967, 30% dari guru SD masih belum berpendidikan SPG, sedangkan sisanya berpendidikan SPG, yaitu pendidikan guru tiga tahun setelah SMP.¹⁴ Jadi benang merah yang bisa ditangkap dari berbagai tulisan Soedijarto adalah bahwa para pengambil keputusan perlu menyatukan antara visi pendidikan para pendiri republik dengan tindakan nyata untuk memperbaiki pendidikan Indonesia.

Berangkat dari kerangka berpikir di atas, maka penulis mencoba memamparkan tentang perjuangan Soedijarto dalam pembangunan pendidikan nasional (1975-2004), dengan beberapa alasan seperti:

1. Belum adanya kajian yang Komprehensif membahas tentang Soedijarto khususnya perjuangan Soedijarto dalam pembangunan pendidikan nasional.
2. Tokoh penting dalam dunia pendidikan, untuk bahan melengkapi penyelesaian masalah pendidikan Indonesia
3. Ikatan emosional dengan UNJ yang tentunya akan melahirkan kebanggaan UNJ yang mungkin sesuai dengan kebutuhan UNJ saat ini.

¹⁴ Ruth Daroesman, *Alternative Educational Strategies and Their Financial Implication*, Jakarta, BP3K, 1976, hal. 11

Penulis mencoba membahas bagaimana perjuangan Soedijarto dalam pembangunan pendidikan nasional. Dalam hal ini apa yang melatarbelakangi perjuangan tersebut tersebut dan bagaimana kemudian perjuangan tersebut mempunyai relevansi terhadap dunia pendidikan saat ini.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu pembatasan secara *temporal* (waktu). Batas temporal yang ditetapkan oleh peneliti adalah tahun 1975-2004. Batas awalnya adalah tahun 1975 karena tahun tersebut merupakan tahun penting karier Soedijarto sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum. Kemudian batas akhir penelitian ini adalah tahun 2004 karena tahun tersebut merupakan tahun akhir dimana Soedijarto bekerja di MPR.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, berikut terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Mengapa Soedijarto tertarik terhadap dunia pendidikan Indonesia, dan apa yang melatarbelakanginya?
2. Mengapa Soedijarto berpendapat penyelenggaraan pendidikan nasional memerlukan 20 persen dari APBN & APBD?

C. Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah singkat perjuangan Soedijarto dalam pembangunan pendidikan nasional dan relevansi nya terhadap dunia pendidikan saat ini.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis

- Karya Ilmiah ini dapat menjadi kontribusi untuk menambah pemahaman berkaitan dengan perjuangan Soedijarto dalam pembangunan pendidikan nasional dan relevansi nya terhadap dunia pendidikan saat ini
- Sebagai sumber referensi untuk penelitian sejenis di kemudian hari

Kegunaan Praktis

- Sebagai bahan kajian dan referensi dalam kajian Sejarah Pendidikan dan Teori Belajar dan Pembelajaran
- Mendorong masyarakat untuk berpikir kritis dan memaknai lebih dalam usaha Soedijarto memajukan pendidikan Indonesia.

D. Metode Penelitian dan Sumber Bahan

1. Metode

Studi ini dilakukan dengan pendekatan sejarah yang ingin melihat perjuangan dan tantangan Soedijarto dalam dunia pendidikan, khususnya perjuangannya dalam pembangunan pendidikan nasional. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan penyajian data hasil penelitian berbentuk deskriptif analisis yang berorientasi pemecahan

masalah. Penelitian sejarah dalam penulisan mempunyai lima tahapan yaitu: (a) Pemilihan topik, (b) pengumpulan sumber, (c) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (d) interpretasi: analisis dan sintesis, dan (e) penulisan.¹⁵ Penelitian ini akan menempuh beberapa langkah atau tahapan sebagai berikut:

a. Pemilihan topik

Dalam penelitian ini, peneliti memilih topik tentang perjuangan Soedijarto dalam pembangunan pendidikan nasional dengan berdasarkan pendekatan intelektual peneliti.

b. Heuristik

Teknik mencari atau menemukan informasi berkaitan dengan topik yang dibahas dalam bentuk buku dan surat kabar yang akan digunakan untuk menunjang penelitian. Sumber primer yang digunakan berupa buku kumpulan pemikiran Soedijarto. Tidak hanya berupa buku, sumber primer lainnya yang diperoleh berupa surat kabar, Sumber sekunder berupa buku-buku dan jurnal seputar pemikiran dan kebijakan pendidikan Soedijarto. Peneliti memperoleh sumber terkait di Perpustakaan Sejarah UNJ, Perpustakaan FIS UNJ, Perpustakaan Pusat UNJ, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

¹⁵Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013) h. 69

c. Verifikasi atau Kritik Sejarah

Pada tahap ini peneliti melakukan kritik sumber dengan membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk melihat kredibilitasnya dan relevansinya baik dari segi internal maupun eksternal sumber tersebut.

d. Interpretasi atau Penafsiran Sumber

Pada tahap ini peneliti melakukan analisa terhadap fakta-fakta yang terdapat di dalam sumber untuk mendapatkan kesimpulan.

e. Historiografi

Penyajian penulisan sejarah terdiri dari tiga bagian: (1) pengantar, (2) hasil penelitian, dan (3) kesimpulan. Fakta-fakta yang telah melewati tahap pengujian kemudian di urutkan secara kronologis dan sistematis sehingga dapat dipahami oleh pembaca.

2. Sumber Penelitian

Sumber-sumber sejarah yang digunakan sebagai bahan penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder didapat dari buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan perjuangan Soedijarto dalam pembangunan pendidikan nasional. Sumber primer yang digunakan berupa buku kumpulan pemikiran yaitu, buku yang di tulis oleh Soedijarto yang berjudul ‘Landasan dan arah Pendidikan Nasional kita’ yang diterbitkan tahun 2008 oleh Penerbit Buku Kompas. Tidak hanya berupa buku, sumber primer lainnya yang diperoleh berupa surat

kebar, yaitu Surat Kabar Antara, Minggu 30 Desember 1962 yang diperoleh di Arsip Nasional RI & wawancara.

Sementara itu, sumber-sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa buku yang secara umum maupun spesifik yang berhubungan dengan topik penelitian. Buku-buku maupun jurnal yang diperoleh melalui studi kepustakaan berasal dari koleksi Perpustakaan Sejarah UNJ, Perpustakaan FIS UNJ, Perpustakaan Pusat UNJ, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia antara lain seperti *Pendidikan sebagai sarana Reformasi Mental dalam Upaya Pembangunan Bangsa*, *Pendidikan Nasional sebagai wahana Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara-Bangsa (Sebuah Usaha memahami makna UUD 45)*, *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional dalam Menyiapkan Manusia Indonesia (1997)*, *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional (1993)* serta *Menuju Pendidikan Nasional yang Relevan dan Bermutu*.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan suatu penelitian historis yang mendahului penelitian yang akan ditulis. Historiografi atau penulisan kembali merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian sejarah. Tujuan dari pencantuman historiografi yang relevan dalam sebuah penelitian adalah untuk membuat penelitian yang ditulis lebih jelas.¹⁶

¹⁶Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer Historical Method*, terj. Nugroho Notosusanto, Mengerti Sejarah (Jakarta: UI Press, 1986), h. 29

Sejauh ini belum ada penelitian yang komprehensif mengenai Biografi Soedijarto dalam Pembangunan Pendidikan Nasional (1975-2004)''.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

- a. Dasar Pemikiran
- b. Pembatasan dan Perumusan Masalah
- c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- d. Metode dan Bahan Sumber
- e. Penelitian Relevan
- f. Sistematika Penulisan

BAB II: BIOGRAFI SOEDIJARTO

- a. Latar Belakang Keluarga
- b. Latar Belakang Pendidikan
- c. Karir Birokrasi

BAB III: SUMBANGAN SOEDIJARTO TERHADAP PENDIDIKAN INDONESIA

- a. Cita-cita Pendidikan Ideal menurut Soedijarto
- b. Soedijarto dan Kurikulum 1975
- c. Masa Soedijarto di MPR (1999-2004)
- d. Perjuangan Soedijarto melalui tulisan
- e. Relevansi Pemikiran Soedijarto dengan Pendidikan Indonesia Saat ini

BAB IV: PENUTUP DAN KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

